

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan suatu lembaga dalam kehidupan masyarakat kota ataupun desa tentunya sangat penting, mengingat manusia sebagai makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri membutuhkan lembaga dimana ia bisa bersosialisasi dengan norma dan aturan yang telah disepakati bersama. Lembaga memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan serta menyelesaikan permasalahan masyarakat dibidang apapun, kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi akan terpenuhi jika ada lembaga ekonominya begitupun dengan bidang lainnya. Oleh karena itu upaya dalam mengatasi permasalahan di tingkat petani akan dilakukan melalui kelembagaan petani. Sektor pertanian merupakan sektor strategis yang berperan terhadap penyerapan tenaga kerja dan merupakan basis ekonomi masyarakat desa, serta menjadi katup pengaman ketika perekonomian mengalami krisis dimana sektor lain tidak mampu dalam mengatasi guncangan ekonomi tersebut. Namun, salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah masalah kelembagaan.

Kelembagaan menurut Pratama (2012:54), mengarah pada suatu pola hubungan antara anggota masyarakat yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi dengan ditentukan oleh variabel-variabel pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan non-formal sebagai bentuk kerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Kelembagaan berasal dari kata "lembaga" yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kelembagaan yang ada di masyarakat desa memiliki perbedaan dengan organisasi atau asosiasi, khususnya dalam hal tujuan pengaturannya. Jika suatu pengaturan difokuskan pada pencapaian tujuan tertentu, hal itu berkaitan dengan isu organisasi. Sementara itu, jika pengaturan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, maka hal tersebut terkait dengan isu kelembagaan. Di samping itu, perkembangan dan perubahan kelembagaan di desa-desa Indonesia dipengaruhi oleh variabel-variabel internal dan juga oleh pengaruh-pengaruh eksternal yang datang dari luar desa (Ninin Sintia, 2020).

Kelembagaan tani adalah lembaga yang dibangun dari, oleh, dan untuk petani untuk meningkatkan kerjasama dan memajukan kepentingan mereka melalui pembentukan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) (Ninin Sintia, 2020). Kelembagaan tani, di sisi lain, adalah konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai jenis organisasi, struktur, dan lembaga yang ada di sektor pertanian. Ini termasuk kelompok tani, koperasi petani,

asosiasi petani, badan pemasaran bersama, dan bahkan lembaga keuangan yang melayani petani. Lembaga tani ini memainkan peranan krusial dan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Proses partisipasi suatu kelembagaan ditentukan oleh keputusan kebijaksanaan organisasi dalam membagi beban dan manfaat terhadap anggota dalam organisasi tersebut. Terkait dengan kelembagaan di pedesaan, terdapat beberapa unit-unit sosial (kelompok, kelembagaan dan organisasi) yang merupakan aset untuk dapat dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal dapat dilakukan dengan sistem jejaring kerjasama yang setara dan saling menguntungkan.

Kelembagaan tani memiliki peran dan tujuan penting dalam mengatur dan mendukung kegiatan pertanian, menciptakan sinergi antar petani, dan memfasilitasi interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan lain di sektor pertanian. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan pertanian melalui berbagai inisiatif dan kerjasama. Menurut (Sapja Anantanyu, 2011), kelembagaan tani memainkan peran yang luas dan multifungsi:

1. Tugas dalam Organisasi (*Interorganizational Task*): Kelembagaan tani berperan sebagai mediator antara masyarakat petani dan negara. Ini termasuk advokasi kebijakan yang menguntungkan bagi petani, serta memastikan bahwa kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh petani diakui dan ditangani oleh pemerintah.
2. Tugas Sumber Daya (*Resource Tasks*): Ini mencakup mobilisasi dan pengelolaan sumber daya lokal seperti tenaga kerja, modal, material, dan informasi. Kelembagaan tani membantu dalam mengorganisir dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya ini untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar, seperti peningkatan produktivitas atau pengembangan infrastruktur pertanian.
3. Tugas Pelayanan (*Service Tasks*): Kelembagaan tani dapat menyediakan atau memfasilitasi akses ke berbagai layanan yang mendukung pembangunan pertanian dan kebutuhan lokal, seperti pelatihan, pendidikan, dan layanan teknis yang membantu petani meningkatkan metode dan hasil pertanian mereka.
4. Tugas Antar Organisasi (*Extra-Organizational Task*): Kelembagaan tani juga berperan dalam berinteraksi dengan birokrasi dan organisasi di luar komunitas pertanian, seperti agen pembangunan atau donor internasional. Tugas ini mencakup negosiasi dan koordinasi bantuan, investasi, dan proyek pembangunan yang memengaruhi komunitas pertanian.
5. Gabungan dari peran dan tujuan ini menunjukkan bahwa kelembagaan tani tidak hanya berfokus pada aspek produksi pertanian tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas yang memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan petani. Ini mencerminkan suatu pendekatan holistik untuk

memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat pedesaan.

Kelembagaan petani sangat diperlukan dalam mengelola variabel-variabel produksi, proses produksi, sampai dengan pengolahan hasil pertanian. Hampir semua negara baik negara maju maupun berkembang dan di Indonesia sendiri mengakui kelembagaan petani sangat diperlukan dalam tahapan pembangunan pertanian. Kelembagaan dalam suatu usaha tani memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tahapan usaha tani. Namun, mayoritas kelompok tani masih berada dalam tingkatan pemula sehingga kinerjanya sangat rendah. Padahal kelembagaan petani sangat diharapkan mampu membantu petani dalam mengatasi semua persoalan pada setiap permasalahan pertanian. Namun, kenyataan memperlihatkan kecenderungan masih lemahnya kelembagaan petani di setiap negara serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat petani (Anantanyu, 2011). Pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa keberdayaan kelembagaan dalam sektor pertanian sangatlah diperlukan mengingat di tingkat makro nasional, peran kelembagaan pertanian sangat menonjol dalam program dan proyek intensifikasi dan peningkatan produksi pangan. Kelembagaan tersebut terkesan dipaksakan sehingga seringkali tidak berjalan optimal (Nasrul, 2012). Kelembagaan petani yang lemah dan belum optimal berdampak pada rendahnya posisi tawar petani dalam tata niaga produk pertanian. Hal ini jelas terlihat dari rendahnya harga yang diterima petani atas produk yang dihasilkan, padahal resiko akan kegagalan panen yang mungkin dihadapi petani cukup tinggi.

Strategi merupakan rencana yang dibuat oleh Lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dimana rencana tersebut meliputi: tujuan, kebijakan dan tindakan yang harus diambil lembaga atau organisasi untuk mempertahankan keberadaannya dan mengatasi permasalahan yang ada di dalam maupun diluar lembaga atau organisasi (Sekarnira, 2023). Penguatan kelembagaan sendiri menurut (Resmiati, dkk, 2019) adalah seperangkat strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan tanggung jawab manajemen dengan menitikberatkan pada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan atau lingkungan. Penguatan kelembagaan tani juga didasarkan pada hasil analisis terhadap variabel pendorong dan penghambat (Yuniati et al., 2017). Penguatan kelembagaan petani dapat menjamin adanya kontinuitas atau kesinambungan pada usaha penyebaran pengetahuan teknis atau teknologi kepada petani dan menyiapkan petani agar mampu bersaing dalam struktur ekonomi yang lebih terbuka dimana Kerjasama petani dalam kelembagaan dapat mendorong penggunaan sumberdaya yang lebih efisien (Listyati dkk, 2014). Penguatan kelembagaan umumnya dilakukan dengan melakukan kegiatan pembekalan yang diperlukan dengan penadmpingan rutin, agar kelompok dapat berkembang menjadi kelembagaan yang aktif, sehat, partisipatif, berfungsi dan bermanfaat bagi anggotanya.

Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), sebuah lembaga yang akan membantu dalam memfasilitasi pembinaan dan pengembangan petani dan masyarakat pedesaan. P4S berfungsi sebagai lembaga pelatihan yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh petani dan masyarakat secara swadaya. Ini menunjukkan bagaimana lembaga ini secara langsung terlibat dalam pembangunan pertanian melalui berbagai program pelatihan dan pemagangan yang dirancang khusus untuk mempercepat adopsi teknologi baru dalam agribisnis di tingkat petani dan masyarakat pedesaan (Syamsuddin, 2014).

Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya yang selanjutnya disebut P4S merupakan kelembagaan tani dengan model pelatihan menggunakan metode permagangan pertanian dan pedesaan yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh pelaku usaha secara swadaya baik perorangan maupun kelompok. P4S sendiri pertama kali di gagas pada penyelenggaraan Penas V (Pekan Nasional Petani Nelayan) di Lampung Tengah pada tanggal 20-25 Agustus tahun 1983 yang sejak saat itu sejumlah petani-nelayan mulai memelopori penyelenggaraan pelatihan dan magang dirumah masing-masing hingga pada awal tahun 1990 an disepakatai nama pelatihan dan permagangan tersebut dengan nama Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S). Adapun tujuan utama dari pembentukan P4S tersebut untuk mempercepat akses dan penerapan informasi teknologi melalui proses pembelajaran petani beserta keluarganya sesuai kondisi nyata dilapangan. Selain itu, dengan berlatih dan magang di P4S, petani diharapkan mampu menolong dirinya sendiri dalam meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahterannya guna memaksimalkan pembangunan pertanian.

P4S menyediakan beberapa keunggulan yang membuatnya unik dan efektif dalam perannya, termasuk: penyelenggaraan pembelajaran yang lebih terstruktur dan sistematis; materi pembelajaran yang disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan petani pembelajar; kesempatan bagi petani untuk belajar secara praktis dan mengatasi masalah yang dihadapi di lapangan; efektivitas dan efisiensi dalam transfer teknologi di antara petani; serta persiapan para petani untuk segera menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam mengelola lahan usahanya. Dengan memiliki keunggulan dalam melakukan usaha tani pedesaan dan kesukarelaan untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan keterampilan, P4S memainkan peran penting dalam mendukung masyarakat pedesaan.

Adapun perkembangan penyebaran kelembagaan tani P4S menurut data dari P4S Pertanian tercatat pada akhir tahun 1993 P4S yang tumbuh hanya 14 P4S di 10 provinsi, dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1995, jumlah P4S meningkat menjadi 46 P4S di 20 provinsi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tanggal 22 Oktober 2001 bersamaan dengan PENAS X di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, terbentuk wadah bersama P4S seluruh Indonesia dengan nama FORUM KOMUNIKASI PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PEDESAAN SWADAYA (FK-P4S). Di Sulawesi Selatan

sendiri menurut data dari P4S Pertanian tercatat ada 61 P4S yang tersebar di beberapa kabupaten kota. Namun jumlah tersebut bukanlah jumlah keaktifan, tidak semua P4S berjalan sesuai peran dan fungsinya. Hal tersebut bisa dilihat pada data dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) tahun 2022 mengenai P4S per Provinsi berikut :

*Tabel 1.* Jumlah P4S di Indonesia per Provinsi 2022

Provinsi	Jumlah P4S	Provinsi	Jumlah P4S
Aceh	14	Kalimantan Utara	15
Bali	16	Kepulauan Bangka Belitung	14
Banten	48	Lampung	36
Bengkulu	35	Maluku Utara	2
DI Yogyakarta	48	Nusa Tenggara Barat	52
DKI Jakarta	37	Nusa Tenggara Timur	64
Gorontalo	21	Riau	9
Jambi	30	Sulawesi Barat	9
Jawa Barat	247	Sulawesi Selatan	17
Jawa Tengah	192	Sulawesi Tengah	15
Jawa Timur	132	Sulawesi Tenggara	18
Kalimantan Barat	24	Sulawesi Utara	15
Kalimantan Selatan	32	Sumatera Barat	39
Kalimantan Tengah	29	Sumatera Selatan	25
Kalimantan Timur	35	Sumatera Utara	11
	Total		1.281

Sumber: P4S BPPSDMP, 2022

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa di Sulawesi Selatan jumlah P4S yang masih aktif dan berjalan sesuai fungsinya hanya 17 dari 61 P4S yang terdaftar di P4S Pertanian. Salah satu dari 17 P4S yang masih aktif dan berjalan sesuai fungsinya tersebut adalah P4S Buluballea yang berada di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa.

P4S Buluballea fokus pada produksi tanaman hortikultura, termasuk proses seperti pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, pengendalian hama dan penyakit, serta panen, pengemasan, dan distribusi. Permintaan tanaman hortikultura meningkat setiap tahun sejalan dengan peningkatan standar hidup masyarakat, yang mengarah pada peningkatan konsumsi sayur dan buah-buahan. Sayuran, yang kaya akan nutrisi seperti mineral, vitamin, protein nabati, dan serat, sangat penting untuk kesehatan.

P4S Buluballea terletak di daerah dengan iklim yang mendukung pengembangan berbagai produk hortikultura, yang merupakan sektor penting dalam ekonomi lokal dan telah berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan pangan, kesehatan, kosmetik, dan perdagangan. Lokasi strategis dekat Kota Makassar juga membuka peluang pasar yang signifikan. Melalui semua ini, P4S Buluballea tidak hanya meningkatkan

kesejahteraan petani tetapi juga memperkuat sistem pertanian di Sulawesi Selatan, mendukung inisiatif keberlanjutan, dan meningkatkan konsumsi sayur yang kaya gizi di komunitas lokal. P4S Buluballea juga memainkan peran kritis dalam mendukung dan memperkuat sektor pertanian di Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, melalui berbagai inisiatif yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan petani lokal. Peran tersebut yakni peningkatan keterampilan petani, pengenalan teknologi baru, dan dukungan managerial serta pemasaran.

P4S Buluballea sangat aktif dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai kelembagaan tani sehingga menjadi satu-satunya P4S di Kabupaten Gowa yang masih aktif hingga kini, sedangkan kelembagaan P4S lainnya mengalami penurunan dalam menjalankan peran dan fungsinya bahkan ada yang dibentuk hanya untuk menerima bantuan saja tanpa menjalankan peran dan fungsinya. P4S Buluballea terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak didirikan pada tahun 2006 dengan kepemimpinan Ir. Arifuddin Siala dan sampai saat ini pun mereka telah memiliki mitra tetap yakni Pizza Hut. Melihat fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait gambaran strategi serta variabel penguatan kelembagaan tani yang diterapkan oleh P4S Buluballea dengan judul "**Penguatan Kelembagaan Tani Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Buluballea Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa**".

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana variabel-variabel penguatan kelembagaan tani di P4S Buluballea sehingga tetap aktif dan berjalan sampai sekarang.
2. Bagaimana strategi penguatan kelembagaan tani yang diterapkan di P4S Buluballea Kecamatan Tinggi moncong, Kabupaten Gowa sehingga tetap eksis sampai sekarang ini.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dijabarkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui variabel-variabel penguatan kelembagaan tani di P4S Buluballea.
2. Untuk mengetahui strategi penguatan kelembagaan tani yang diaplikasikan oleh P4S Buluballea Kecamatan Tinggi moncong, Kabupaten Gowa sehingga tetap eksis sampai sekarang ini. Sebab adanya penguatan kelembagaan sangat menentukan nasib kelembagaan tani kedepannya.

Hasil dari penelitian ini akan meningkatkan kepedulian dan kesadaran

terhadap pentingnya penguatan kelembagaan tani demi mendukung pembangunan pertanian yang maksimal. Dimana masyarakat khususnya masyarakat petani akan lebih mengenal peran dan fungsi kelembagaan tani yang begitu penting dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi, sehingga akan mengubah persepsi dan pandangan masyarakat untuk lebih memperhatikan lagi setiap aspek dalam pertanian khususnya pada aspek kelembagaan sebagai jembatan untuk mencapai kesejahteraan petani, tentunya ini juga berlaku bagi pemerintah pusat maupun pemerintah setempat.

Selain itu melalui hasil penelitian ini akan memacu kreativitas dan inovasi baru terkait mengenai kelembagaan tani pada penelitian selanjutnya, dimana penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi yang baik dalam mengetahui suatu strategi penguatan kelembagaan tani serta menunjukkan variabelnya sebagaimana telah disebutkan dalam tujuan pada penelitian ini, yang tentunya membuka ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan dan memberikan inovasi baru terkait mengenai penguatan kelembagaan tani. Semua hal yang dibahas dalam penelitian ini tentunya menjadi tambahan wawasan intelektual bagi akademisi dalam mengkaji mengenai topik penguatan kelembagaan tani.

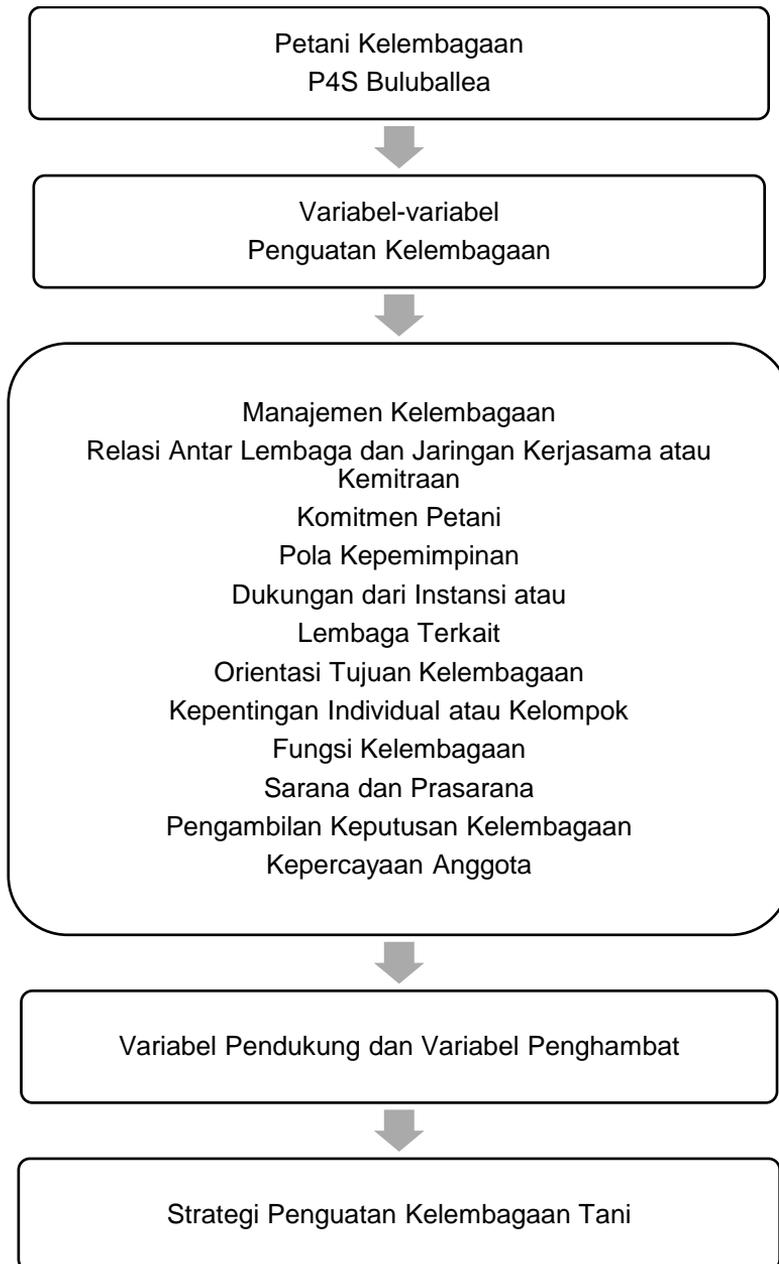
#### **1.4 Kerangka Penelitian**

Strategi penguatan kelembagaan pertanian sangatlah penting mengingat kelembagaan pertanian merupakan salah satu variabel penggerak dalam sistem produksi sangat penting guna menunjang keberlanjutan pertanian (Yunita dkk, 2014). Strategi penguatan kelembagaan tani p4S Buluballea sendiri memiliki banyak variabel yakni manajemen kelembagaan, relasi antar lembaga, jaringan kerja sama atau kemitraan, komitmen petani, pola kepemimpinan, dukungan dari instansi atau lembaga terkait, orientasi tujuan kelembagaan, kepentingan individual atau kelompok, fungsi kelembagaan, sarana, dan prasarana, pengambilan keputusan kelembagaan, dan kepercayaan anggota.

Kesemua variabel tersebut berperan penting dalam penguatan kelembagaan tani hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian (Sapja Anantanyu, 2011) yang mengungkapkan bahwa kepentingan individual atau kelompok, dan kepercayaan anggota, yang diwujudkan dalam suatu wadah kelompok menjadi strategi dalam meningkatkan penguatan dalam kelembagaan. Dalam penelitian (Yeni et al., 2019) mengungkap bahwa variabel sarana dan prasarana sangat memengaruhi penguatan kelembagaan tani. Ditambah bahwa beberapa penelitian dalam penelitian (dewi Listyati, dkk, 2014) mengungkap bahwa dalam penelitian (Hermanto dan Swastika, 2011) menyatakan bahwa variabel jaringan kerjasama atau kemitraan, manajemen kelembagaan, orientasi tujuan kelembagaan, dan komitmen petani menjadi langkah utama dalam penguatan kelembagaan tani, (Ngomane, dkk 2002) juga

menyatakan bahwa, variabel relasi antar lembaga, dan dukungan dari instansi atau lembaga terkait akan menjadikan kelembagaan tani semakin lebih kuat, sedangkan dalam penelitian (Arsyad, dkk, 2013) mengingatkan bahwa variabel manajemen, pola kepemimpinan, dan pengambilan keputusan menjadi variabel yang sangat penting untuk mencapai tujuan dan peningkatan kelembagaan tani, dan (Titus dan Adefisayo, 2012) juga menyebutkan bahwa variabel fungsi kelembagaan menjadikan kelembagaan tani lebih kuat.

Kesebelas variabel strategi penguatan kelembagaan tani P4S Buluballea tersebut dibagi menjadi dua macam yakni variabel pendukung dan penghambat dalam penguatan kelembagaan tani sebagaimana yang dimaksudkan dalam penelitian (Sapja Anantanyu, 2011). Dari kesemua variabel itulah akan didapatkan bagaimana gambaran sebenarnya dari strategi penguatan kelembagaan tani yang diaplikasikan oleh lembaga tani P4S Buluballea hingga tetap eksis sampai sekarang dalam menjalankan peran dan fungsinya. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka kerangka pikir disusun seperti gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kelembagaan Tani

Kelembagaan menurut Pratama (2012:54), mengarah pada suatu pola hubungan antara anggota masyarakat yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan non-formal sebagai bentuk kerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Kelembagaan berasal dari kata “lembaga” yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kelembagaan yang ada di masyarakat desa memiliki perbedaan dengan organisasi atau asosiasi, khususnya dalam hal tujuan pengaturannya. Jika suatu pengaturan difokuskan pada pencapaian tujuan tertentu, hal itu berkaitan dengan isu organisasi. Sementara itu, jika pengaturan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, maka hal tersebut terkait dengan isu kelembagaan. Di samping itu, perkembangan dan perubahan kelembagaan di desa-desa Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan juga oleh pengaruh-pengaruh eksternal yang datang dari luar desa (Ninin Sintia, 2020).

Kelembagaan tani adalah lembaga yang dibangun dari, oleh, dan untuk petani untuk meningkatkan kerjasama dan memajukan kepentingan mereka melalui pembentukan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) (Ninin Sintia, 2020). Kelembagaan tani, di sisi lain, adalah konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai jenis organisasi, struktur, dan lembaga yang ada di sektor pertanian. Ini termasuk kelompok tani, koperasi petani, asosiasi petani, badan pemasaran bersama, dan bahkan lembaga keuangan yang melayani petani. Lembaga tani ini memainkan peranan krusial dan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Proses partisipasi suatu kelembagaan ditentukan oleh keputusan kebijaksanaan organisasi dalam membagi beban dan manfaat terhadap anggota dalam organisasi tersebut. Terkait dengan kelembagaan di

pedesaan, terdapat beberapa unit-unit sosial (kelompok, kelembagaan dan organisasi) yang merupakan aset untuk dapat dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal dapat dilakukan dengan sistem jejaring kerjasama yang setara dan saling menguntungkan. Kelembagaan tani memiliki peran dan tujuan penting dalam mengatur dan mendukung kegiatan pertanian, menciptakan sinergi antar petani, dan memfasilitasi interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan lain di sektor pertanian. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan pertanian melalui berbagai inisiatif dan kerjasama. Menurut (Sapja Anantanyu, 2011), kelembagaan tani memainkan peran yang luas dan multifungsi:

1. Tugas dalam Organisasi (Interorganizational Task): Kelembagaan tani berperan sebagai mediator antara masyarakat petani dan negara. Ini termasuk advokasi kebijakan yang menguntungkan bagi petani, serta memastikan bahwa kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh petani diakui dan ditangani oleh pemerintah.
2. Tugas Sumber Daya (Resource Tasks): Ini mencakup mobilisasi dan pengelolaan sumber daya lokal seperti tenaga kerja, modal, material, dan informasi. Kelembagaan tani membantu dalam mengorganisir dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya ini untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar, seperti peningkatan produktivitas atau pengembangan infrastruktur pertanian.
3. Tugas Pelayanan (Service Tasks): Kelembagaan tani dapat menyediakan atau memfasilitasi akses ke berbagai layanan yang mendukung pembangunan pertanian dan kebutuhan lokal, seperti pelatihan, pendidikan, dan layanan teknis yang membantu petani meningkatkan metode dan hasil pertanian mereka.
4. Tugas Antar Organisasi (Extra-Organizational Task): Kelembagaan tani juga berperan dalam berinteraksi dengan birokrasi dan organisasi di luar komunitas pertanian, seperti agen pembangunan atau donor internasional. Tugas ini mencakup negosiasi dan koordinasi bantuan, investasi, dan proyek pembangunan yang mempengaruhi komunitas pertanian.

5. Gabungan dari peran dan tujuan ini menunjukkan bahwa kelembagaan tani tidak hanya berfokus pada aspek produksi pertanian tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan petani. Ini mencerminkan suatu pendekatan holistik untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat pedesaan.

## **2.2 Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)**

Untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian, sangat penting untuk memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga handal dan memiliki kemampuan serta keahlian kewirausahaan yang kuat dan kemampuan manajemen bisnis yang efektif. Dengan demikian, pelaku pembangunan pertanian dapat membangun usaha yang tidak hanya berdaya saing tinggi tetapi juga berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan, selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Penyuluhan pertanian berperan sebagai proses pembelajaran yang penting bagi petani dan pelaku usaha, mengajarkan mereka bagaimana mengorganisasi dan mengakses informasi pasar, teknologi, modal, dan sumber daya lain yang penting untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan mereka secara umum. Penyuluhan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh lembaga formal tetapi juga oleh petani sendiri atau warga masyarakat sebagai mitra dari pemerintah daerah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, ada mandat kuat dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk memfokuskan pada peningkatan kapasitas petani sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dan berdaulat (Syamsuddin, 2013). Ini sangat krusial mengingat posisi sentral petani dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian yang tidak hanya terfokus pada peningkatan produksi komoditas

penting seperti padi, jagung, dan kedelai, tetapi juga dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal secara lebih luas (Swadaya et al., 2016).

Berdasarkan pemikiran tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), sebuah lembaga yang akan membantu dalam memfasilitasi pembinaan dan pengembangan petani dan masyarakat pedesaan. P4S berfungsi sebagai lembaga pelatihan yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh petani dan masyarakat secara swadaya. Ini menunjukkan bagaimana lembaga ini secara langsung terlibat dalam pembangunan pertanian melalui berbagai program pelatihan dan pemagangan yang dirancang khusus untuk mempercepat adopsi teknologi baru dalam agribisnis di tingkat petani dan masyarakat pedesaan (Syamsuddin, 2013).

P4S menyediakan beberapa keunggulan yang membuatnya unik dan efektif dalam perannya, termasuk: penyelenggaraan pembelajaran yang lebih terstruktur dan sistematis; materi pembelajaran yang disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan petani pembelajar; kesempatan bagi petani untuk belajar secara praktis dan mengatasi masalah yang dihadapi di lapangan; efektivitas dan efisiensi dalam transfer teknologi di antara petani; serta persiapan para petani untuk segera menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam mengelola lahan usahanya. Dengan memiliki keunggulan dalam melakukan usaha tani pedesaan dan kesukarelaan untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan keterampilan, P4S memainkan peran penting dalam mendukung masyarakat pedesaan (Dalam et al., 2016).

### **2.3 P4S Buluballea**

Sulawesi Selatan memiliki 61 P4S yang terdistribusi di berbagai kabupaten, termasuk P4S Buluballea. Didirikan pada tahun 2006 dengan kepemimpinan Ir. Arifuddin Siala, P4S Buluballea terletak di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, sebuah area dengan kebanyakan penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Kabupaten Gowa, sebagai salah satu pusat penghasil pangan

di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama di Kecamatan Tinggi Moncong, memiliki kondisi geografis dan iklim yang ideal untuk mengembangkan berbagai produk hortikultura seperti kentang, wortel, dan kubis. Hortikultura di daerah ini termasuk subsektor yang berkembang cepat dan berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional, terutama dalam hal penyediaan pangan, kesehatan, kosmetik, perdagangan, dan penyerapan tenaga kerja (BPS Kabupaten Gowa, 2022).

P4S Buluballea fokus pada produksi tanaman hortikultura, termasuk proses seperti pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, pengendalian hama dan penyakit, serta panen, pengemasan, dan distribusi. Permintaan tanaman hortikultura meningkat setiap tahun sejalan dengan peningkatan standar hidup masyarakat, yang mengarah pada peningkatan konsumsi sayur dan buah-buahan. Sayuran, yang kaya akan nutrisi seperti mineral, vitamin, protein nabati, dan serat, sangat penting untuk kesehatan. Dalam hal produksi, pada tahun 2020, Kecamatan Tinggi Moncong mencatat produksi kentang sebesar 229.350 ton dan wortel sebesar 103.300 ton, dengan kentang dan tomat sebagai salah satu dari tiga komoditas utama di provinsi tersebut (BPS, 2021).

P4S Buluballea terletak di daerah dengan iklim yang mendukung pengembangan berbagai produk hortikultura, yang merupakan sektor penting dalam ekonomi lokal dan telah berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan pangan, kesehatan, kosmetik, dan perdagangan. Lokasi strategis dekat Kota Makassar juga membuka peluang pasar yang signifikan. Melalui semua ini, P4S Buluballea tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani tetapi juga memperkuat sistem pertanian di Sulawesi Selatan, mendukung inisiatif keberlanjutan, dan meningkatkan konsumsi sayur yang kaya gizi di komunitas lokal. P4S Buluballea juga memainkan peran kritis dalam mendukung dan memperkuat sektor pertanian di Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, melalui berbagai inisiatif yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan petani lokal. Peran tersebut yakni peningkatan keterampilan petani, pengenalan teknologi baru, dan dukungan managerial serta pemasaran.

## **2.4 Strategi Penguatan Kelembagaan Tani**

### **1. Pengertian Strategi**

Strategi merupakan rencana yang dibuat oleh Lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dimana rencana tersebut meliputi: tujuan, kebijakan dan tindakan yang harus diambil lembaga atau organisasi untuk mempertahankan keberadaannya dan mengatasi permasalahan yang ada di dalam maupun diluar lembaga atau organisasi (Sekarnia Maze Keswari, 2023).

### **2. Penguatan Kelembagaan**

Menurut (Resmiati, dkk, 2019) penguatan kelembagaan adalah seperangkat strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan tanggung jawab manajemen dengan menitikberatkan pada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan atau lingkungan. Penguatan kelembagaan tani juga didasarkan pada hasil analisis terhadap faktor pendorong dan penghambat (Sri Yuniati, dkk, 2017).